



# Membangun Politik Berintegritas Melalui Implementasi Pancasila

Pingkan Loriska<sup>1</sup>, Fitria<sup>2</sup>, Maiza Fikri<sup>3</sup>

<sup>1,2</sup>Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Indonesia,

<sup>3</sup>Institut Teknologi dan Bisnis Bina Sriwijaya, Indonesia

Email: [pingkanloriskaa@gmail.com](mailto:pingkanloriskaa@gmail.com), [fitria85861@gmail.com](mailto:fitria85861@gmail.com), [maizafikri10@gmail.com](mailto:maizafikri10@gmail.com)

## Article Info

### Article history:

Received November 20, 2025

Revised Desember 03, 2025

Accepted Desember 06, 2025

### Keywords:

Pancasila, Politics With Integrity, Political Ethics.

## ABSTRACT

*Politics with integrity is the main foundation in realizing a democratic, fair, and cisciful national and state life. However, the contemporary political reality in Indonesia is still faced with various problems, such as corruption practices, money politics, social polarization, and low ethics in political contestation. This article aims to examine how the implementation of Pancasila values can be the basis for building politics with integrity. The method used in this writing is a literature study by studying various literature, journals, and documents that are relevant to the theme of Pancasila and political ethics. The results of the study show that every precept in Pancasila contains moral principles that are very relevant to be applied in political practice, ranging from divinity, humanity, unity, deliberation, to social justice. The implementation of these values consistently can form an honest, responsible, fair attitude, and prioritize the interests of the people over personal or group interests. Thus, Pancasila not only serves as the foundation of the state, but also as an ethical guideline in building a political culture with integrity and sustainability.*

*This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.*



## Article Info

### Article history:

Received November 20, 2025

Revised Desember 03, 2025

Accepted Desember 06, 2025

### Keywords:

Pancasila, Politik Berintegritas, Etika Politik.

## ABSTRACT

Politik berintegritas merupakan fondasi utama dalam mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis, adil, dan berkeadaban. Namun, realitas politik kontemporer di Indonesia masih dihadapkan pada berbagai persoalan, seperti praktik korupsi, politik uang, polarisasi sosial, serta rendahnya etika dalam kontestasi politik. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana implementasi nilai-nilai Pancasila dapat menjadi dasar dalam membangun politik yang berintegritas. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah studi kepustakaan dengan mengkaji berbagai literatur, jurnal, serta dokumen yang relevan dengan tema Pancasila dan etika politik. Hasil kajian menunjukkan bahwa setiap sila dalam Pancasila mengandung prinsip moral yang sangat relevan untuk diterapkan dalam praktik politik, mulai dari ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, hingga keadilan sosial. Implementasi nilai-nilai tersebut secara konsisten dapat membentuk sikap jujur, bertanggung jawab, adil, serta mengutamakan kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadi atau golongan. Dengan demikian, Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai dasar negara, tetapi juga sebagai pedoman etis dalam membangun budaya politik yang berintegritas dan berkelanjutan.

*This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.*



---

***Corresponding Author:***

Pingkan Loriska

Universitas Islam Negeri Raden Fatah

Email: [pingkanloriskaa@gmail.com](mailto:pingkanloriskaa@gmail.com)

---

**PENDAHULUAN**

Pancasila merupakan dasar negara sekaligus ideologi bangsa Indonesia yang memiliki peran strategis dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila tidak hanya menjadi pedoman dalam aspek sosial, budaya, dan hukum, tetapi juga dalam kehidupan politik. Politik sebagai sarana untuk mewujudkan tujuan bernegara seharusnya dijalankan dengan menjunjung tinggi nilai moral, etika, serta tanggung jawab kepada rakyat. Namun, dalam praktiknya, dunia politik di Indonesia masih dihadapkan pada berbagai permasalahan yang menunjukkan lemahnya integritas para pelaku politik, seperti korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, politik uang, hingga konflik kepentingan yang merugikan masyarakat luas.

Fenomena tersebut menunjukkan terdapat perbedaan antara nilai-nilai Pancasila yang diharapkan dengan kenyataan dalam praktik politik yang berlangsung. Politik yang seharusnya mengutamakan kepentingan umum justru sering kali dipergunakan sebagai alat untuk memenuhi kepentingan pribadi maupun golongan. Kondisi ini tidak hanya merusak kepercayaan publik terhadap lembaga negara dan para pemimpin, tetapi juga melemahkan kualitas demokrasi serta menghambat terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Rendahnya integritas dalam politik juga berdampak pada meningkatnya sikap apatis masyarakat terhadap proses politik, seperti rendahnya partisipasi dalam pemilu dan menurunnya kepercayaan terhadap sistem pemerintahan.

Di tengah berbagai persoalan tersebut, Pancasila sejatinya memiliki kekuatan nilai yang mampu menjadi solusi dalam membangun politik yang berintegritas. Setiap sila dalam Pancasila mengandung prinsip moral yang relevan dengan etika politik, mulai dari nilai ketuhanan yang menuntut kejujuran dan tanggung jawab, nilai kemanusiaan yang menekankan keadilan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, nilai persatuan yang menghindarkan politik dari perpecahan, nilai demokrasi melalui musyawarah, hingga nilai keadilan sosial yang mengutamakan kesejahteraan bersama. Jika nilai-nilai tersebut diimplementasikan secara konsisten, maka praktik politik yang bermoral dan berintegritas dapat terwujud.

Namun demikian, implementasi Pancasila dalam kehidupan politik belum sepenuhnya berjalan optimal. Nilai-nilai luhur Pancasila sering kali hanya dijadikan sebagai simbol atau slogan, tanpa diiringi dengan pengamalan yang nyata dalam perilaku para pelaku politik. Pendidikan politik yang berlandaskan Pancasila pun masih perlu diperkuat, baik di lingkungan formal maupun nonformal, agar masyarakat dan generasi muda memiliki kesadaran politik yang bermoral, kritis, dan bertanggung jawab. Tanpa adanya internalisasi nilai-nilai Pancasila sejak dini, sulit untuk menciptakan budaya politik yang bersih dan berintegritas.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penting dilakukan kajian mengenai bagaimana membangun politik berintegritas melalui implementasi nilai-nilai Pancasila. Kajian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif tentang peran strategis Pancasila dalam membentuk karakter politik yang jujur, adil, dan berorientasi pada kepentingan rakyat. Selain itu, kajian ini juga diharapkan dapat menjadi dasar pemikiran



dalam merumuskan solusi untuk memperkuat budaya politik yang beretika, demokratis, dan berkeadilan di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, rumusan masalah yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut: 1) Bagaimana kondisi praktik politik di Indonesia saat ini ditinjau dari perspektif nilai-nilai Pancasila, 2) Bagaimana peran Pancasila dalam membangun politik yang berintegritas, 3) Bagaimana upaya implementasi nilai-nilai Pancasila untuk mewujudkan politik yang berintegritas di Indonesia.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan secara rinci mengenai implementasi pancasila dalam integritas politik. Adapun manfaat dari penelitian ini meliputi Untuk mengetahui dan menganalisis kondisi praktik politik di Indonesia ditinjau dari perspektif nilai-nilai Pancasila, untuk mengkaji peran Pancasila dalam membangun politik yang berintegritas, dan Untuk mendeskripsikan upaya implementasi nilai-nilai Pancasila dalam menciptakan politik yang bermartabat di Indonesia.

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan dalam pengembangan kajian ilmu politik dan pendidikan kewarganegaraan, khususnya yang berkaitan dengan implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan politik. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi akademik bagi peneliti selanjutnya yang mengkaji tema politik berintegritas, etika politik, serta penguatan ideologi Pancasila dalam sistem demokrasi di Indonesia. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada para pelaku politik, penyelenggara negara, serta masyarakat umum mengenai pentingnya integritas dalam praktik politik yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi bahan pertimbangan bagi lembaga pendidikan, pemerintah, dan organisasi kemasyarakatan dalam merumuskan kebijakan, program pendidikan politik, serta pembinaan karakter politik yang beretika dan bertanggung jawab. Bagi mahasiswa dan generasi muda, penelitian ini dapat menjadi sumber edukasi untuk menumbuhkan kesadaran politik yang bermoral dan berorientasi pada kepentingan bangsa.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **1. Konsep Dasar**

Pancasila merupakan dasar negara sekaligus ideologi bangsa Indonesia yang memuat nilai-nilai fundamental sebagai pedoman dalam seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai sistem nilai, Pancasila mengandung prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial yang bersifat universal namun tetap berpijak pada kepribadian bangsa. Dalam konteks politik, Pancasila berfungsi sebagai landasan moral, etika, dan orientasi tujuan penyelenggaraan kekuasaan negara. Politik dipahami sebagai proses penentuan kebijakan publik, pengelolaan kekuasaan, serta pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat luas. Politik seharusnya berfungsi sebagai sarana untuk mewujudkan cita-cita bangsa yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945, yakni melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia.

Namun, praktik politik tidak dapat dilepaskan dari dimensi moral dan etika. Oleh karena itu, integritas menjadi unsur yang sangat penting dalam kehidupan politik. Integritas dimaknai sebagai kesatuan antara nilai, sikap, pikiran, perkataan, dan perbuatan yang dilandasi oleh kejujuran, tanggung jawab, konsistensi, serta komitmen terhadap kebenaran. Dalam dunia politik, integritas mencerminkan kualitas moral seorang pemimpin atau pelaku politik dalam menggunakan kekuasaan yang diembannya. Politik yang dijalankan tanpa integritas berpotensi melahirkan berbagai penyimpangan, seperti korupsi, kolusi, nepotisme, politik uang, manipulasi kebijakan, serta pengkhianatan terhadap aspirasi rakyat. Sebaliknya,



politik berintegritas akan melahirkan pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, serta berpihak pada kepentingan publik.

## **2. Studi Sebelumnya**

Politik berintegritas merupakan praktik politik yang mengedepankan nilai etika, tanggung jawab, dan pengabdian kepada rakyat. Jabatan politik dipandang sebagai amanah yang harus dipertanggungjawabkan, baik secara moral, sosial, maupun konstitusional. Dalam politik berintegritas, kekuasaan tidak digunakan sebagai alat untuk memperkaya diri atau kelompok, melainkan sebagai sarana untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat serta mewujudkan kesejahteraan bersama. Politik berintegritas juga menuntut adanya sikap adil, jujur, transparan, dan konsisten dalam setiap pengambilan keputusan, serta keberanian untuk menolak segala bentuk tekanan yang bertentangan dengan nilai moral dan hukum.

Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam politik merupakan proses penerapan setiap sila dalam perilaku individu, kebijakan publik, serta sistem kelembagaan negara. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa menuntut pelaku politik untuk memiliki kesadaran moral dan tanggung jawab spiritual dalam menjalankan kekuasaan dengan jujur dan amanah.

Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab menekankan pentingnya penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia serta perlindungan hak asasi manusia dalam setiap kebijakan politik. Sila Persatuan Indonesia mengarahkan praktik politik agar tidak menimbulkan disintegrasi, konflik, maupun politik identitas yang memecah belah bangsa. Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan menegaskan bahwa demokrasi Indonesia harus dijalankan berdasarkan musyawarah, kebijaksanaan, dan partisipasi rakyat. Sementara itu, prinsip Keadilan Sosial untuk Semua Warga Negara Indonesia menjadi sasaran utama dari seluruh rangkaian proses, yaitu terwujudnya kesejahteraan yang merata dan berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Dengan demikian, konsep politik berintegritas melalui implementasi Pancasila menegaskan bahwa Pancasila tidak hanya dipahami sebagai simbol atau slogan ideologis, melainkan harus diinternalisasikan dan diwujudkan secara nyata dalam praktik politik sehari-hari. Penginternalisasian nilai-nilai Pancasila dalam diri pelaku politik, lembaga negara, serta masyarakat menjadi syarat utama dalam membangun budaya politik yang bermoral, demokratis, dan berkeadilan. Melalui politik yang berintegritas dan berlandaskan Pancasila, diharapkan kehidupan politik nasional dapat berjalan lebih sehat, dipercaya oleh masyarakat, serta mampu mewujudkan tujuan bernegara secara berkelanjutan.

Berdasarkan hasil-hasil penelitian sebelumnya tersebut, dapat disimpulkan bahwa implementasi Pancasila memiliki korelasi yang kuat dengan terwujudnya politik yang berintegritas. Namun, masih terdapat celah dalam penerapan nilai-nilai Pancasila secara nyata dalam kehidupan politik. Hal inilah yang menjadi urgensi sekaligus pembeda dari penelitian ini, yaitu untuk menegaskan kembali pentingnya implementasi Pancasila sebagai solusi utama dalam membangun politik yang berintegritas di Indonesia.

## **3. Kerangka Teori**

Kerangka teori dalam penelitian ini dibangun atas dasar keterkaitan antara teori nilai Pancasila, teori politik, dan teori integritas sebagai satu kesatuan yang saling menguatkan dalam membangun politik berintegritas. Pancasila dipahami sebagai sistem nilai sekaligus sistem etika politik yang berfungsi sebagai pedoman moral dalam penyelenggaraan kekuasaan negara. Dalam perspektif teori nilai, Pancasila mengandung seperangkat prinsip dasar yang menjadi standar dalam menilai baik dan buruknya perilaku politik. Nilai



Ketuhanan menuntut kejujuran dan tanggung jawab moral, nilai kemanusiaan menekankan penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia, nilai persatuan mengarahkan politik agar tidak memecah belah bangsa, nilai kerakyatan menegaskan pentingnya demokrasi yang berlandaskan musyawarah, serta nilai keadilan sosial menempatkan kesejahteraan rakyat sebagai tujuan utama politik.

Sementara itu, teori integritas menekankan bahwa integritas merupakan kesatuan antara nilai, sikap, ucapan, dan tindakan yang dilandasi oleh kejujuran, konsistensi, dan tanggung jawab. Dalam konteks politik, integritas menjadi syarat utama bagi terwujudnya kepemimpinan yang bersih dan beretika. Pelaku politik yang berintegritas akan menggunakan kekuasaan sebagai amanah, bukan sebagai sarana untuk memperkaya diri. Integritas juga menjadi dasar bagi terciptanya akuntabilitas publik dan legitimasi kekuasaan di mata masyarakat.

Berdasarkan keterpaduan ketiga teori tersebut, dapat disimpulkan bahwa politik berintegritas hanya dapat terwujud apabila nilai-nilai Pancasila benar-benar diimplementasikan dalam praktik kekuasaan secara konsisten. Pancasila memberikan fondasi moral, teori politik memberikan kerangka tujuan kekuasaan, dan teori integritas memastikan keselarasan antara nilai dan tindakan. Dengan demikian, implementasi Pancasila tidak hanya bersifat normatif, tetapi menjadi landasan nyata dalam membangun budaya politik yang jujur, adil, demokratis, dan berpihak pada kepentingan rakyat.

## **METODE**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif digunakan untuk memahami secara mendalam fenomena politik berintegritas melalui implementasi nilai-nilai Pancasila berdasarkan realitas sosial yang terjadi. Pendekatan deskriptif bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan faktual mengenai kondisi praktik politik, peran Pancasila, serta upaya penerapan nilai-nilai Pancasila dalam membangun politik yang berintegritas di Indonesia.

Penelitian ini tidak menggunakan data dalam bentuk angka, melainkan mengandalkan data berupa kata-kata, makna, pandangan, serta interpretasi terhadap fenomena yang diteliti. Dengan demikian, penelitian kualitatif dianggap paling relevan karena mampu mengungkap nilai, sikap, perilaku, serta dinamika yang terjadi dalam praktik politik secara lebih mendalam dan komprehensif. Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan (library research) dengan mengkaji buku, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, serta sumber-sumber tertulis lain yang relevan dengan tema Pancasila dan politik berintegritas.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Berdasarkan hasil kajian terhadap berbagai sumber literatur, praktik politik di Indonesia saat ini menunjukkan adanya dinamika yang kompleks antara idealitas nilai-nilai Pancasila dengan realitas politik yang terjadi di lapangan. Secara normatif, Pancasila telah ditegaskan sebagai dasar negara dan sumber dari segala sumber hukum. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai penyimpangan yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, seperti maraknya kasus korupsi, politik uang, penyalahgunaan wewenang, serta rendahnya etika dalam kontestasi politik. Kondisi ini menunjukkan bahwa nilai ketuhanan yang menuntut kejujuran dan amanah belum sepenuhnya terinternalisasi dalam diri sebagian pelaku politik.

Praktik politik di Indonesia jika ditinjau dari perspektif nilai-nilai Pancasila menunjukkan adanya kesenjangan antara idealitas yang diharapkan dengan realitas yang





terjadi di lapangan. Secara konstitusional, Pancasila telah ditetapkan sebagai dasar negara sekaligus pedoman moral dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk dalam bidang politik. Artinya, seluruh aktivitas politik semestinya dijalankan berdasarkan nilai kejujuran, keadilan, persatuan, demokrasi, dan kesejahteraan rakyat. Namun dalam praktiknya, politik di Indonesia masih diwarnai oleh berbagai persoalan seperti korupsi, politik uang, penyalahgunaan kekuasaan, rendahnya etika politik, serta kuatnya kepentingan pragmatis. Kondisi ini berdampak pada menurunnya kepercayaan publik terhadap lembaga politik dan para elit penguasa.

Jika dilihat dari nilai Ketuhanan, praktik politik masih menunjukkan lemahnya integritas dan tanggung jawab moral, yang tercermin dari masih banyaknya kasus pelanggaran hukum oleh pejabat publik. Dari sisi Kemanusiaan dan Keadilan, masih terdapat kebijakan yang belum sepenuhnya berpihak kepada rakyat kecil serta ketimpangan sosial yang cukup signifikan. Nilai Persatuan juga menghadapi tantangan serius akibat polarisasi politik, konflik akibat perbedaan pilihan, serta menguatnya politik identitas yang berpotensi memecah belah bangsa. Sementara itu, pelaksanaan demokrasi yang bersumber dari nilai Kerakyatan dan Musyawarah masih sering didominasi oleh kepentingan elite dan tekanan kelompok tertentu, sehingga aspirasi rakyat belum sepenuhnya tersalurkan secara adil. Nilai Keadilan Sosial sebagai tujuan akhir dari seluruh proses politik juga belum sepenuhnya terwujud secara merata dalam kehidupan masyarakat.

Berdasarkan kondisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa praktik politik di Indonesia belum sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai Pancasila secara utuh dan konsisten. Pancasila masih sering diposisikan sebagai simbol normatif, belum sepenuhnya menjadi pedoman nyata dalam perilaku politik sehari-hari. Oleh karena itu, diperlukan penguatan implementasi nilai-nilai Pancasila secara menyeluruh, baik melalui keteladanan pemimpin, pendidikan politik yang bermoral, penegakan hukum yang tegas, maupun partisipasi aktif masyarakat, agar politik di Indonesia dapat benar-benar berjalan secara berintegritas, demokratis, dan berkeadilan.

Pancasila memiliki peran yang sangat fundamental dalam membangun politik yang berintegritas karena Pancasila merupakan dasar negara, ideologi bangsa, sekaligus sumber nilai moral dalam penyelenggaraan kehidupan politik di Indonesia. Pancasila menjadi pedoman etika yang mengarahkan perilaku para pelaku politik agar kekuasaan dijalankan secara jujur, adil, bertanggung jawab, serta berorientasi pada kepentingan rakyat. Politik yang berintegritas hanya dapat terwujud apabila seluruh proses politik dilandaskan pada nilai-nilai Pancasila secara konsisten dan berkelanjutan.

Nilai Ketuhanan menanamkan kesadaran moral dan tanggung jawab dalam menggunakan kekuasaan secara amanah. Nilai Kemanusiaan menuntun politik agar menjunjung tinggi harkat, martabat, dan hak asasi manusia. Nilai Persatuan berperan dalam menjaga politik agar tidak memecah belah bangsa di tengah perbedaan kepentingan. Nilai Kerakyatan mengarahkan praktik demokrasi agar dijalankan melalui musyawarah yang bijaksana dan partisipatif, sedangkan nilai Keadilan Sosial mengarahkan seluruh kebijakan politik pada tujuan kesejahteraan yang merata.

Dengan demikian, Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai dasar negara secara formal, tetapi juga sebagai pedoman moral substantif dalam membangun budaya politik yang bersih, transparan, demokratis, dan berkeadilan. Implementasi nilai-nilai Pancasila yang konsisten akan memperkuat integritas para pelaku politik, meningkatkan kepercayaan publik, serta memperkuat kualitas demokrasi di Indonesia.

Upaya implementasi nilai-nilai Pancasila dalam mewujudkan politik yang berintegritas harus dilakukan secara menyeluruh, sistematis, dan berkelanjutan, baik melalui aspek pendidikan, keteladanan pemimpin, penguatan sistem hukum, maupun partisipasi aktif masyarakat. Pancasila tidak cukup hanya dipahami sebagai dasar negara secara normatif,



tetapi harus diinternalisasikan menjadi pedoman nyata dalam sikap, perilaku, dan kebijakan politik.

Salah satu upaya utama adalah melalui penguatan pendidikan Pancasila dan pendidikan politik di seluruh jenjang pendidikan. Pendidikan ini tidak hanya menekankan pada aspek kognitif, tetapi juga pada pembentukan karakter, moral, dan etika politik. Melalui pendidikan Pancasila, generasi muda diharapkan memiliki kesadaran politik yang jujur, kritis, bertanggung jawab, serta menolak segala bentuk praktik politik yang menyimpang seperti korupsi dan politik uang.

Upaya berikutnya adalah keteladanan dari para pemimpin dan elit politik. Implementasi nilai Pancasila akan lebih efektif apabila ditunjukkan melalui contoh nyata dalam perilaku pemimpin, seperti kejujuran, kesederhanaan, tanggung jawab, serta keberanian menolak praktik-praktik politik yang tidak bermoral. Keteladanan memiliki pengaruh besar dalam membentuk budaya politik yang berintegritas di tengah masyarakat.

Selain itu, penguatan penegakan hukum yang adil dan tegas juga menjadi upaya penting dalam mewujudkan politik berintegritas. Hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu terhadap pelaku pelanggaran etik maupun tindak pidana politik. Penegakan hukum yang konsisten akan memberikan efek jera serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem politik dan pemerintahan.

Upaya lainnya adalah penguatan sistem demokrasi yang sehat dan bermoral, yakni demokrasi yang tidak hanya menekankan pada prosedur pemilu, tetapi juga menjunjung tinggi etika, musyawarah, keadilan, serta penghormatan terhadap perbedaan. Proses politik harus dijalankan secara transparan, partisipatif, dan berorientasi pada kepentingan rakyat, bukan kepentingan kelompok tertentu.

Di samping itu, peran aktif masyarakat dalam pengawasan politik juga sangat menentukan. Masyarakat yang kritis, melek politik, dan berpegang pada nilai-nilai Pancasila akan menjadi kekuatan kontrol sosial terhadap jalannya kekuasaan. Partisipasi masyarakat dalam mengawasi kebijakan publik, mengkritisi penyimpangan, serta menggunakan hak pilih secara bertanggung jawab merupakan wujud nyata dari implementasi Pancasila dalam kehidupan politik.

Dengan demikian, implementasi nilai-nilai Pancasila untuk mewujudkan politik yang berintegritas menuntut sinergi antara negara, pemimpin, lembaga pendidikan, dan masyarakat. Tanpa komitmen bersama, Pancasila akan tetap menjadi simbol, bukan sebagai pedoman nyata dalam praktik politik. Oleh karena itu, penguatan nilai-nilai Pancasila harus terus dilakukan agar politik di Indonesia benar-benar berjalan secara jujur, adil, demokratis, dan berkeadilan sosial.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil diskusi, dapat ditarik kesimpulan bahwa tindakan politik di Indonesia saat ini masih menunjukkan terdapat perbedaan antara nilai-nilai yang diharapkan dari Pancasila dengan realitas yang terjadi di lapangan. Berbagai permasalahan seperti korupsi, politik uang, polarisasi politik, serta lemahnya etika politik menjadi indikator belum optimalnya implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan politik. Kondisi ini menunjukkan bahwa Pancasila masih sering diposisikan sebagai dasar normatif, belum sepenuhnya menjadi pedoman nyata dalam perilaku para pelaku politik. Pancasila memiliki peran yang sangat fundamental dalam membangun politik yang berintegritas karena Pancasila merupakan sumber nilai moral, etika, dan arah tujuan penyelenggaraan kekuasaan. Nilai-nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan Sosial jika diimplementasikan secara konsisten mampu membentuk praktik politik yang jujur, adil, demokratis, serta berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Politik yang berintegritas hanya



dapat terwujud apabila kekuasaan dijalankan sebagai amanah dan bentuk pengabdian kepada masyarakat.

Upaya implementasi nilai-nilai Pancasila dalam mewujudkan politik berintegritas harus dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan melalui pendidikan Pancasila dan pendidikan politik, keteladanan pemimpin, penguatan penegakan hukum, penguatan demokrasi yang bermoral, serta partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan politik. Dengan komitmen bersama dari seluruh elemen bangsa, Pancasila tidak hanya menjadi simbol ideologis, tetapi benar-benar hidup dan terwujud dalam praktik politik sehari-hari demi terciptanya kehidupan politik yang bersih, adil, dan berkeadaban di Indonesia.

## **SARAN**

1. Bagi Pemerintah dan Lembaga Negara, Pemerintah dan seluruh lembaga negara diharapkan dapat memperkuat komitmen dalam mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila secara nyata dalam setiap proses penyelenggaraan kekuasaan, baik dalam perumusan kebijakan, pelaksanaan pemerintahan, maupun pengawasan, serta menegakkan hukum secara adil dan tegas terhadap setiap bentuk pelanggaran etika politik.
2. Bagi Lembaga Pendidikan, Lembaga pendidikan diharapkan dapat mengoptimalkan pendidikan Pancasila dan pendidikan politik dengan pendekatan yang lebih aplikatif dan kontekstual, sehingga tidak hanya menanamkan pengetahuan, tetapi juga membentuk karakter, sikap kritis, serta kesadaran moral generasi muda dalam kehidupan politik.
3. Bagi Pelaku Politik dan Pemimpin Publik, Para pelaku politik dan pemimpin publik diharapkan mampu memberikan keteladanan nyata dalam mengamalkan nilai-nilai Pancasila melalui sikap jujur, adil, bertanggung jawab, serta menjadikan jabatan sebagai amanah untuk melayani kepentingan rakyat.
4. Bagi Masyarakat, Masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi diharapkan dapat meningkatkan partisipasi politik secara cerdas, aktif, dan bertanggung jawab, baik dalam pemilu maupun dalam pengawasan terhadap jalannya pemerintahan, dengan tetap berpegang pada nilai-nilai Pancasila.
5. Bagi Peneliti Selanjutnya, Peneliti selanjutnya disarankan untuk mengembangkan penelitian ini dengan pendekatan lapangan agar diperoleh gambaran yang lebih empiris mengenai implementasi nilai-nilai Pancasila dalam praktik politik, serta memperluas kajian pada peran generasi muda dan media digital dalam membangun politik yang berintegritas.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Ahmad Muhamad Mustain Nasoha, Ashfiya Nur Atqiya, Aurellia Zahra Putri Areje, Lailatul Allifah, & Siti Norhalisa. (2024). Pancasila sebagai Dasar Negara dan Hukum Internasional Implementasi Nilai-nilai Kemanusiaan dalam Kebijakan Luar Negeri Indonesia. *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora*, 3(1), 151–159. <https://doi.org/10.59246/aladalah.v3i1.1107>
- Ahmad Muhamad Mustain Nasoha, Ashfiya Nur Atqiya, Nabila Aprilia Nur Azizah, Nina Faris Effendi, & Nova Layla Rahmadani. (2024). Pancasila dan Penguatan Hukum Tata Negara Dalam Era Demokrasi: Pancasila and Strengthening Constitutional Law





- in the Era of Democracy. *LITERA: Jurnal Ilmiah Mutidisiplin*, 1(1), 25–33. Retrieved from <https://litera-academica.com/ojs/litera/article/view/60>
- Anggraini, D. Fathari, F. Anggara, JW. Al Amin, MD. (2020). Pengamalan nilai-nilai Pancasila bagi generasi milenial. *Jurnal Inovasi Ilmu Sosial dan Politik (JISoP)*, 2(1), 11-18.
- Astuti, N. R. W., & Dewi, D. A. (2021). Pentingnya Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Menghadapi Perkembangan IPTEK. *Journal Education, Psychology and Counseling*, 3(1), 429. Retrieved from <https://ummaspul.e-journal.id/Edupsyscouns/article/view/1263>
- Cahyadi, R. (2021). *Etika Politik dan Pemerintahan*. Pusaka Media.
- Delita Putri B, Dewi Masyithoh, Dwi Mulya P. (2021). Pentingnya Penerapan Nilai-Nilai Pancasila Pada Remaja di Era Society 5.0. *Jurnal Sumbangsih*, 2(1). DOI: <https://doi.org/10.23960/jsh.v2i1.48>
- Fadhil, M., Ilham Hudi, Asrini, Putri Rama Sari, Ajeng Sofiantini, Angguni Desilva Sari, Dwindi Kayla Amarta, & Rahma Dini Putri. (2024). Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Dinamika Politik. *Kybernology Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Administrasi Publik*, 2(1). <https://doi.org/10.71128/kybernology.v2i1.62>
- Fatkhuri, F. (2019). Desentralisasi Pendidikan di Indonesia: Korupsi dan Problem Politik Kekuasaan. *KEMUDI: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 3(2), 278-297.
- Farikiansyah, I. M., Salamah, M. N., Rokhimah, A., Ma'rifah, L., Faruq, F. N. F., & Al Gufron, M. A. (2024). Meningkatkan Partisipasi Pemilu melalui Literasi Politik Pemuda Milenial dalam Pendidikan Kewarganegaraan. *Journal of Education Research*, 5(4), 6512–6523. <https://doi.org/10.37985/jer.v5i4.793>
- Handayani, P. A., & Dewi, D. A. (2021). Implementasi Pancasila Sebagai Dasar Negara. *Jurnal Kewarganegaraan*, 5(1), 6-12.
- Integrasi Prinsip-Prinsip Pancasila dalam Perumusan Kebijakan Hukum Nasional. (2025). *IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research*, 3(2), 66-74. <https://doi.org/10.60153/ijolares.v3i2.215>
- Jannah Maya, & Kusno (2020). Peran Pendidikan Pancasila Bagi Masyarakat Dalam Pembentukan Karakter Dan Moral Berbangsa Dan Bernegara. *Jurnal pendidikan*.
- Kartika, I. M. (2018). Peranan nilai-nilai pancasila dalam membangun etika politik di Indonesia. *WidyaAccarya*, 9(2).
- M. Rafiq Efrianda Hutabarat, & Zainarti Zainarti. (2024). Pancasila Sebagai Fondasi Utama Dalam Implementasi Dan Signifikansi Nasional. *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa*, 2(4), 1219–1225. <https://doi.org/10.61722/jipm.v2i4.417>
- Mu'ti, A., & Burhani, A. . (2019). The limits of religious freedom in Indonesia: with reference to the first pillar Ketuhanan Yang Maha Esa of Pancasila. *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies*, 9(1), 111–134.
- Nur, Putri A.R, & Truvadi, Arum Linashar (2023). Peran Pendidikan Pancasila Dalam Membentuk Karakter Indonesia: Tinjauan Dan Implikasi. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*.
- Omad, A. (2022). Ketua KPU: Banyak Pihak Bisa Cegah Politik Identitas. Retrieved July 25, 2022, from Jaring.id website: <https://jaring.id/ketua-kpu-banyak-pihak-bisa-cegahpolitik-identitas/>
- Rahma, A. N., & Dewi, D. A. (2021). Implementasi Pancasila Sebagai Pandangan Hidup Bangsa Indonesia Dalam Kehidupan Sehari-Hari. *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial*, 18(1), 63–74. <https://jurnal.fkip.untad.ac.id/index.php/jurpis/article/download/1089/978/287>
- Samosir, O., & Novitasari, I. (2022). Hak Politik Warga Negara Dalam Cengkeraman Politik



- Identitas: Refleksi Menuju Pemilu Serentak Nasional Tahun 2024. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik*, 2(3), 332–346. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v2i3>
- Wikrama, A. A. N. A. W. B. (2020). Pemilihan Umum Indonesia Antara Demokrasi Pancasila dan Demokrasi Liberal. *Jurnal Ilmiah Cakrawarti*, 2(2), 10–18. <https://doi.org/10.47532/jic.v2i2.124>